



**Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI**

## PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN INDONESIA

**Hartini Retnaningsih**  
Analisis Legislatif Ahli Utama  
[hartini.retnaningsih@dpr.go.id](mailto:hartini.retnaningsih@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Oleh karena itu, kesehatan merupakan hal yang sangat krusial dan menjadi tanggung jawab negara.

Meskipun pemerintah telah berupaya melakukan pembangunan kesehatan dengan berbagai strategi, tetapi hingga saat ini upaya tersebut belum merata. Bahkan, tantangan pembangunan kesehatan semakin berat dan membutuhkan solusi. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, Indonesia menghadapi permasalahan kronis dalam pembangunan kesehatan nasional.

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang belum merata menjadi salah satu masalah krusial dalam pembangunan kesehatan. Dalam uji publik peraturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Anna Kurniati (18/09/2023) menyatakan, pendayagunaan tenaga medis (Named) dan tenaga kesehatan (Nakes) merupakan salah satu upaya pemerintah mencapai target transformasi kesehatan untuk memenuhi, pemeratakan, dan meningkatkan kapasitas SDM kesehatan. Nakes dan Named yang cukup dan merata merupakan pendukung penting bagi sistem pelayanan kesehatan. SDM kesehatan yang akan didayagunakan meliputi dokter Aparatur Sipil Negara (ASN), peserta didik program pendidikan dokter spesialis/subspesialis atau dokter gigi spesialis/subspesialis, tenaga medis dan tenaga kesehatan lulusan lembaga pendidikan pemerintah pusat ataupun daerah, serta dokter WNI lulusan luar negeri.

Pemenuhan Named dan Nakes masih menjadi tantangan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Menurut data Kemenkes hingga Juni 2023, pada pelayanan kesehatan primer masih terdapat 4,17% puskesmas yang tidak memiliki dokter, 45% puskesmas belum lengkap 9 jenis Nakes (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, sanitarian, petugas laboratorium, dan tenaga gizi). Pada pelayanan kesehatan lanjutan, sebanyak 38,48% RSUD di tingkat kabupaten/kota belum lengkap 7 jenis dokter spesialis (penyakit dalam, anak, kandungan, bedah, anestesi, radiologi dan patologi klinik).

Dalam Rencana Peraturan Pemerintah (RPP), Menteri Kesehatan menetapkan jenis Named dan Nakes yang menjadi prioritas, termasuk juga kriteria fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi lokus untuk penugasan khusus serta daerah atau lokasi fasilitas kesehatan yang menjadi prioritas.

Pemerintah pusat atau pemerintah daerah wajib menyediakan alat kesehatan, sediaan farmasi, sarana prasarana, dan tunjangan daerah maupun fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan. Selain itu, hak Named dan Nakes sedikitnya mencakup penghasilan, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Dalam RPP juga terdapat 30 pasal mulai dari Pasal 227 hingga Pasal 257 yang khusus membahas pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, mulai dari insentif atau disinsentif dari pemerintah pusat ke daerah; pemerataan; penempatan; pemindahtugasan; daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan; daerah bermasalah kesehatan; Named/Nakes pengganti; pola ikatan dinas; penempatan Nakes ke luar negeri; pendayagunaan Nakes dan Named WNI lulusan luar negeri; serta Named dan Nakes WNA.

## Atensi DPR

Komisi IX DPR RI memiliki atensi terhadap masalah pemerataan SDM kesehatan dalam rangka menjawab tantangan pembangunan kesehatan Indonesia. Beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan upaya Pemerintah dalam melakukan distribusi SDM kesehatan agar terjadi keseimbangan jumlah SDM kesehatan di berbagai wilayah NKRI.
2. Terus memantau permasalahan kesehatan Indonesia, terlebih pada masalah distribusi Named dan Nakes yang belum merata, dan mendiskusikan dengan Pemerintah untuk mencari solusinya.
3. Terus mendorong Pemerintah agar melaksanakan pembangunan kesehatan secara profesional dan akuntabel berdasarkan permasalahan yang dihadapi, dengan merujuk pada tantangan pembangunan kesehatan yang telah dipetakan oleh Bappenas.

## Sumber

antaranews.com, 19 September 2023;  
kemkes.go.id, 19 September 2023;  
kompas.id, 18, 20 & 21 September 2023; dan  
*Kompas*, 19 & 21 September 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial



## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

**Ekkuinbang**  
Mandala Harefa  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Monika Suhayati

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.